

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID PELAKSANA)
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2021**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANTUL

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Yang Dimiliki

Pelayanan informasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul belum memiliki ruangan tersendiri. Meja layanan informasi masih bersatu dengan meja layanan surat menyurat dengan fasilitas pendukung yang lain adalah tersedianya ruang tunggu bagi pemohon informasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia yang menangani secara khusus pelayanan informasi di Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul belum ada, sehingga Pelayanan informasi melibatkan seluruh sumber daya yang ada di di Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	08:30 – 14:30	12:00 – 13:00
Jum'at	08:30 – 14:30	11:00 – 13:00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Ruang layanan surat menyurat di Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul Sayap Barat Lantai III.
- b. E-mail : hukum@bantulkab.go.id
- c. Telepon : 0274 - 367509 psw 421
- d. Website PPID : jdih.bantulkab.go.id

3. Anggaran Pelayanan Informasi

Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul belum mengalokasikan secara Khusus untuk pelayanan informasi publik.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan pelayanan melalui e-mail dan pelayanan melalui web Bagian Hukum.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat :

1	Jumlah permohonan informasi publik	213
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	11
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Tidak ada

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 pengajuan

E. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2021 adalah masih minimnya pemohon informasi di Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul.

2. Kendala Internal

Kendala Internal yang dihadapi Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul selama tahun 2021, yaitu

- a. Belum adanya ruangan khusus untuk melayani informasi publik;
- b. Data dan informasi yang dimiliki masih sedikit, belum didukung dengan database yang lengkap;
- c. Belum adanya SDM yang secara khusus melayani informasi public.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

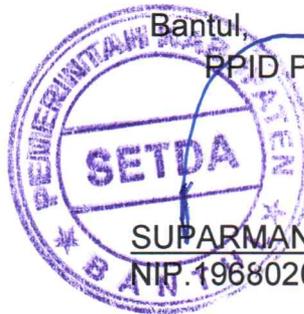
1. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi antar PPID Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pelayanan informasi
2. Meningkatkan kelengkapan data terkait data informasi publik;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik.

Bantul, Januari 2022
PPID Pelaksana

SUPARMAN, S.IP, M.Hum
NIP.196802081992031007

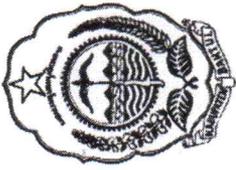
Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Mengikuti Pertemuan Forum Komunikasi PPID	
3	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	31 Desember



Bantul, Januari 2022
PPID Pelaksana

SUPARMAN, S.IP, M.Hum
NIP. 196802081992031007



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

Manajemen

Jl. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711 Telp. (0274) 367509, 367424
Faks. (0274) 368078 Email : setda@bantulkab.go.id

DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

No	Tanggal		Nama	Alamat	Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Cara Memperoleh Informasi		Bentuk Informasi		Alasan Penolakan (Informasi yang diminta tidak diberikan)
	Terima	Ditanggapi							Ada	Tidak	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan	Hard File	Soft file	
1.	14/1/21	14/1/21	Ahmad Rosid	Desa Trimulyo	-	-	Juklak Percepatan Penanganan Covid -19	Untuk menindaklanjuti kegiatan penanganan covid tingkat Kalurahan	√		√			√	-
2.	14/1/21	14/1/21	Fembi Yulianto	Somengan, Jambidan, banguntapan	-	-	Peraturan terkait PTSL (Perbup 75 Th 2017)	-	√		√			√	
3.	15/3/21	15/3/21	Kalyana	Pandak, Bantul	-	-	Peraturan terkait	Mengetahui aturan ttg pengelolaan	√		√			√	

